

**Diskusi Buku**

“Alexis de Tocqueville: Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat”

**Pembicara:**

Rizal Mallarangeng

**Moderator:**

Hamid Basyaib

Freedom Institute, 16 Feb 2006

**Hamid:**

Selamat sore. Kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang Alexis de Tocqueville. Tapi sebelumnya saya akan umumkan diskusi-diskusi berikutnya, silahkan anda catat: Tanggal 8 Maret kita akan diskusi buku “Amerika dan Dunia”; Tanggal 26 Maret kita akan diskusi buku “Memperkuat Negara”; dan pada tanggal 5 April akan ada diskusi buku “Guncangan Besar”; dan terakhir tanggal 22 April akan ada diskusi buku “Asas Moral dalam Politik”. Semua bukun ini diterbitkan oleh Freedom Institute. Diskusi-diskusi ini adalah bagian dari peluncuran buku, tapi yang lebih penting bukan peluncuran bukunya tapi buku itu dibaca.

Nah, diskusi sekarang adalah upaya pembacaan itu, dan kita wakikan pembacaan itu pada direktur eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng. Tapi sebelumnya saya minta wakil dari Kedutaan Besar Amerika untuk memberi sambutan singkat. Saya perlu sebut di sini bahwa semua buku itu disponsori oleh Kedubes Amerika. Ibu Donna Silakan.

**(Pidato singkat wakil Kedubes Amerika, Donna)**

**Hamid:**

Sebelum ke Rizal Mallarangeng, saya akan memberi sedikit pengantar aspek-aspek di luar isi buku ini. Hari ini sudah 107 tahun setelah ditulisnya buku “Democracy in America”. Dia mulai menulis buku ini pada usia 26 tahun, dan dia menulis sebenarnya sebagai hakim yang mau meneliti tentang penjara di Amerika. Tapi menurut Bummon, Tocqueville memang sudah mempunyai rencana besar ketimbang sekadar meneliti tentang penjara. Dan kemudian lahirlah buku “Democracy in America” yang kemudian menjadi *masterpiece*-nya. Setelah itu dia juga menulis tentang Revolusi Perancis. Dia sendiri asalnya adalah sebagai hakim. Nah, seperti yang saya katakan tadi, buku ini memang tidak mudah. Saya kira Rizal sudah lama membaca aslinya, dan bukan hanya komentar-komentar tentangnya. Dengan pengantar sederhana itu, saya minta dengan hormat Rizal Mallarangeng memulai paparannya. Silahkan.

**Rizal Mallarangeng:**

Terima kasih, Bung Hamid. Sebenarnya kita tidak perlu lagi diskusi dan langsung masuk ke perdebatan. Sebelumnya saya informasikan bahwa *partner* saya, Bill Liddle, tidak dapat datang karena sakit. Saya menyampaikan permintaan maaf dari beliau. Berbicara tentang demokrasi, jika kita ingin kembali ke asal usulnya, pasti harus ketemu dengan Tocqueville. Sebelumnya, terima kasih kepada ibu donna. Ini adalah bagian dari penerbitan buku-buku Freedom Institute. Tahun ini kira-kira ada 10 buku. Buku ini sangat relevan untuk Indonesia, karena ia mengingatkan kita di Indonesia bahwa demokrasi sebenarnya mempunyai akar yang mendalam pada agama, institusi lokal, dan bahkan kondisi geografis sebuah masyarakat.

Buku lain yang sudah diterbitkan dan akan kita diskusikan juga adalah buku Fukuyama "Memperkuat Negara" yang sangat penting dalam kondisi transisi menuju demokrasi. Mungkin anda heran mengapa Fukuyama menulis buku ini dan Freedom Institute mendiskusikannya. Apakah ini bukan suatu kontradiksi dari pemikiran sebelumnya dan keberadaan Freedom Institute. Pertanyaan ini akan kita jawab dalam diskusi kita bulan depan. Buku kedua adalah "Guncangan Besar". Buku ini menarik karena kita akan melihat bagaimana perubahan global akan mempengaruhi arus pemikiran. Terima kasih kepada Kedubes Amerika yang telah membantu membiayai penerbitan buku-buku ini. Ini bukan masalah pro atau kontra Amerika, tapi menyangkut soal penyebaran gagasan yang dianggap universal.

Kita kembali pada buku yang sangat penting ini. Pengantar saya, kata Bung Rahman Tolleng, itu pengantar kaum penguasa. Saya memberinya judul "Penemu Teori Demokrasi". Demokrasi Amerika adalah demokrasi pertama dalam pengertian modern. Di zaman Yunani memang sudah ada demokrasi, namun itu adalah demokrasi kaum elite. Plato sangat membenci demokrasi saat itu karena jika sifatnya jika bukan anarkis pasti bersifat medioker. Tapi memang aneh bahwa setelah zaman Yunani, demokrasi hilang. Kemudian digantikan kerajaan Romawi. Tidak ada demokrasi. Kemudian di Eropa muncul apa yang disebut 1000 tahun abad kegelapan. Nah mulai terang sedikit pada zaman Pencerahan.

Di Amerika muncul demokrasi pertama kali dalam pengertiannya yang modern. Ini mengjutkan semua pemikir besar yang lahir pada zaman itu. Termasuk Marx. Tetapi tidak satu pun yang datang dengan satu buku utuh tentang apa yang disebut demokrasi. Tocqueville datang dengan bukunya, dan ini merupakan sesuatu yang baru. Pemikirannya, pandangannya dan terutama metodenya dianggap baru. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat evolusi pemikiran tentang masyarakat, manusia dan negara, kelihatan bahwa perubahan ini selalu diawali dengan suatu pemikiran besar. Muncul teori-teori besar tentang masyarakat, ekonomi dsb. Tapi pada dasarnya teori-teori itu bersifat filosofis dan pada dasarnya adalah teori moral. Pada abad 19, Tocqueville adalah puncak pemikiran sosial. Pada abad 17 dan 18, pemikiran sosial dan ekonomi ada tapi bersifat filosofis dan moral. Kalau toh mereka membahas apa yang disebut sebagai demokrasi, seperti Marx dan Hegel, biasanya mereka melihat itu hanya sebagai bagian dari suatu sistem besar. Ini ciri khas *system builders*. Sebelum Tocqueville ada yang sedikit unik sedikit, yakni Montesquieu. Tapi Montesquieu tidak secara khusus membahas tentang demokrasi.

Nah alur pemikiran ini sebenarnya dikembangkan lebih jauh oleh Tocqueville. Tocqueville membahas demokrasi dengan cara yang sama sekali berbeda dari para

pemikir besar tadi. Kalau anda pemikir besar, anda pasti bertingkat secara deduktif. Membangun sistem besar tidak bisa dengan cara lain. Karena itu Marx, misalnya, tidak pernah melakukan penelitian dalam pengertian empiris. Demikian pula Hegel. Hegel menulis banyak hal bukan melalui penelitian lapangan.

Tapi Tocqueville melakukan hal yang sama sekali berbeda. Memang benar kata Hamid bahwa ia datang ke Amerika dengan sesuatu di belakang kepalanya. Ia meneliti tentang penjara, tentang orang hitam dan Indian. Tapi ia mempunyai sesuatu yang lain. Apa yang kemudian ia lakukan adalah metode baru dalam penelitian ilmu sosial waktu itu. Metode ini disebut sebagai metode penelitian empiris, dengan cara berpikir yang induktif. Makanya Raymond Arron, jika anda membaca sosiologi, menempatkan Tocqueville sebagai salah satu peletak dasar ilmu sosiologi modern. Bukan terutama karena pikirannya, tapi karena metodenya.

Lalu apa yang dihasilkan oleh Tocqueville? Ia mulai dengan meneliti tentang penjara. Ketika dia menulis tentang Revolusi Perancis, ia mulai dengan meneliti arsip-arsip yang merekam jejak perubahan politik yang terjadi saat itu. Jadi dia tidak mulai dengan asumsi besar. Ia membalik pemikiran saat itu yang melihat bahwa Revolusi Perancis terjadi karena kemiskinan. Ia melihat bahwa setelah Perancis meningkat pesat, tiba-tiba ada krisis kecil. Jadi istilahnya sekarang adalah *revolution of rising expectation*. Kira-kira itu yang ingin dikatakan Tocqueville, dan cara yang dia pakai adalah melihat dokumennya. Tidak hanya berfikir abstrak tentang revolusi.

Tentang Demokrasi di Amerika. Tocqueville adalah seorang aristokrat. Dia bangsawan. Ia kelas menengah. Dia cenderung menyamakan demokrasi dengan *equality*. Ia melihat bahwa dengan munculnya revolusi industri, terjadi komersialisasi, terjadi industrialisasi, urbanisasi. Semua ini adalah sebuah proses besar yang berujung pada merebaknya persamaan. Dengan adanya industrialisasi, komersialisasi, urbanisasi, bangunan feodalisme yang sudah lama ada runtuh. Manusia menjadi independen. Manusia menjadi otonom. Ini juga ditulis oleh Kant satu abad sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai arus besar persamaan umat manusia. Terjadi di Perancis, Inggris dan Amerika. Namun hanya di Amerika arus ini membawa pada demokrasi liberal. Di Perancis arus ini membawa pada otokrasi. Tocqueville melihat di Inggris belum ada demokrasi liberal. Di Inggris monarki masih kuat. Hanya di Amerika ada demokrasi liberal. Mengapa? Sebelum sampai pada jawaban ini yang sangat menarik buat saya adalah ambivalensi dia melihat gejala persamaan.

Buku ini sangat menarik mana kala kita melihat dilema dia tentang persamaan. Ada dua gejala yang menurut dia selalu mengiringi gejala persamaan itu. Dalam aristokrasi selalu ada penguasa. Ada yang dikuasai dan ada yang menguasai. Kalau ini hilang, karena persamaan, gantinya apa? Kan dalam masyarakat selalu harus ada yang mengatur. Tidak ada ceritanya yang terjadi hanya interaksi antarindividu. Politik selalu ada sejak awal sejarah. Organisasi yang menguasai selalu ada, terlepas apa pun namanya. Salah satu pertanyaan dasar dalam politik adalah mengapa orang tunduk pada peraturan yang dibuat oleh orang lain? Kalau aristokrasi gak ada dan individu semua sama, apa gantinya? Menurut dia ada dua kemungkinan: pertama munculnya negara modern yang absolut dengan tirani mayoritas. Kalau tidak ini yang terjadi, maka yang ada adalah anarki individu. Anda lihat bahwa Tocqueville adalah pro-demokrasi. Bagi dia industrialisasi, komersialisasi, urbanisasi adalah arus sejarah yang tidak bisa ditolak. Bahkan hal ini baik dan perlu. Bagi saya bagusnya seorang pemikir adalah kalau dia tidak

mutlak-mutlakan. Memang dalam prinsip dasar harus ada kemutalakan karena kalau tidak kita juga tidak bisa berpikir. Tapi dalam pemikiran, dia memberikan ruang bagi hal-hal unik yang tidak masuk dalam kerangka berpikir dia.

Nah, setelah membahas sosiologi modern seperti itu, dia masuk ke dalam politik, dia menjelaskan demokrasi di Amerika. Dia bilang bahwa di Amerika juga terjadi gejala yang sama. Tapi di Amerika demokrasi menjadi kuat dan liberal karena beberapa faktor. Menurutnya, ada tiga faktor yang mengurangi dampak negatif dari persamaan dan memperkuat dampak positif dari persamaan itu. Inilah kerangka berpikir dia tentang demokrasi. Di negeri Eropa lain ketiga faktor ini tidak ada. Di Amerika itu ada sehingga membedakannya dari absolutisme dan anarkisme Eropa. Yang pertama adalah kondisi geografis. Amerika tidak pernah terdesak karena lahan yang terbatas. Selalu ada perluasan. Pada saat demokrasinya tumbuh, ia tidak terdesak oleh keadaan geografis. Yang menarik adalah bahwa karena luasnya benua Amerika, maka tidak ada tetangga yang suka nyatroni tetangga yang lain. Bayangkan kalau anda di Jerman, atau Inggris, atau Perancis. Sepanjang sejarah Eropa yang kita lihat adalah sejarah peperangan. Nah perang, kata Tocqueville, adalah salah satu faktor terkuat dalam menumbuhkan negara modern. Kalau anda terancam perang terus-menerus, maka dorongan untuk membentuk suatu institusi birokrasi modern akan sangat kuat. Siapa yang mengongkosinya? Maka anda harus buat institusi perpajakan. Anda harus membuat institusi administratif nasional. Di Amerika, dorongan sentralisasi kurang kuat karena kondisi geografis. Hal lainnya, kata Tocqueville, adalah bahwa amerika sudah lahir modern. Dia tidak punya warisan sejarah aristokrasi.

Jadi faktor pertama kondisi geografis. Faktor kedua, pemerintahan lokal. Yang utama dilihat Tocqueville di Amerika adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal. Istilah barunya adalah *America is the nation of Joiners*. Jadi kalau kita bilang bahwa Amerika adalah individualis itu keliru. Coba di sini berapa orangtua yang pernah mengantar anaknya ke sekolah dan ikut rapat. Di Amerika itu hal yang sangat biasa, bahkan aneh kalau orangtua tidak ikut rapat. Belum lagi di gereja. Ini yang dilihat Tocqueville waktu itu. Kok tinggi sekali tingkat partisipasinya. Kalau dalam buku ini istilahnya kehendak untuk berasosiasi. Jadi proses pembentukan pemerintahan lokal itu muncul dari bawah.

Faktor ketiga yang paling penting. Yakni adat-istiadat yang muncul pada kaum imigran Amerika saat itu. Partisipasi yang tinggi ini didorong oleh sesuatu hal. Dan itu adalah agama protestan. Semuanya puritan. Selain itu, karena kondisi alam yang keras, mereka didorong untuk berani. Ini yang membuat kehendak untuk bebas menjadi sangat kuat. Dorongan untuk bekerja sama dan bekerja keras itu ada. Ini akan ditulis lagi oleh Weber dengan sangat bagus 50 tahun kemudian. Tapi Tocqueville sudah mulai ini. Agama merupakan salah satu perekat yang universal. Artinya harus ada suatu *counter balance* terhadap elemen demokrasi yang destruktif dan menghancurkan dirinya sendiri. Amerika sangat sosial, sangat patriotik—bahkan lebih dari kita mungkin. Lihat lagu kebangsaannya: *The land of the brave, the land of the free*. Tanahnya kaum pemberani, tanahnya kaum yang bebas. Jadi yang dilihat oleh Tocqueville adalah kondisi geografis, nilai-nilainya, dan hal-hal inilah yang memperkuat demokrasi di Amerika. Inilah kekhasan demokrasi di Amerika.

Dari sini kita ambil hikmahnya untuk Indonesia. Pemikiran ini coba kita hidupkan lagi. Salah satu hal yang bisa kita diskusikan dengan melihat Tocqueville adalah

desentralisasi dan federalisme. Demokrasi pada tingkat akhirnya. Unit-unit pemerintahan lokal. Di Indonesia, demokrasi terjadi diikuti oleh desentralisasi. Bahkan di Aceh dan Papua terjadi otonomi khusus. Pertanyaannya adalah apakah arus desentralisasi ini memperkuat demokrasi Indonesia, atau justru melemahkannya. Kalau memperkuat, apa yang diperkuat. Kalau menghancurkan, apa yang dihancurkan. Kenapa itu terjadi?

Ada satu soal lagi yang di Tocqueville belum dibicarakan, yakni hubungan demokrasi dengan pemerintahan yang melayani masyarakat. Ini pertanyaan abad 20. abad 19 belum ada pertanyaan ini. Anda harus ingat, desentralisasi Indonesia itu apa? Melibatkan apa dia? Ingat di bidang pendidikan dan kesehatan dulu semua tersentralisasi. Ingat posyandu, KB, dan BKKBN. Semua itu terpusat. Anda boleh tidak suka dengan sentralisasinya, tapi pemerintahan jalan. Jika desentralisasi tumbuh, maka pemerintahan lokal seharusnya memperbaiki hal ini dan meningkatkannya. Yang kita lihat sekarang, sayangnya adalah sebaliknya. Dana yang mengalir ke tingkat lokal semakin banyak, tetapi pemerintahan lokalnya satu persatu mengalami kemacetan. Tidak ada lagi posyandu, KB. Di Jabar sekarang ini terjadi ledakan penduduk. Gak ada yang mengurus KB, padahal dananya ada. Semuanya sibuk pemekaran, tapi gak ada yang mengurus. Nah ini terjadi karena desentralisasi, demokrasi terjadi tidak diikuti oleh apa yang disebut Tocqueville sebagai semangat kultural yang menopang hal ini. Apakah kita perlu belajar tentang semangat itu? Kalau kita melihat Tocqueville, pertanyaan ini penting. Bagaimana hubungan agama dan demokrasi. Bagaimana hubungan adat istiadat dengan demokrasi. Dengan itu saya akhiri presentasi ini.

### **Hamid:**

Terima kasih, Celi. Saya kadang heran. Tocqueville menulis ini umur 26. Pada usia ini ia datang dari Perancis ke Amerika dan melihat hal-hal yang tak lazim dilihat. Saya ingat teman kita di LP3ES yang bertahun-tahun membina pedagang mebel Kudus. Pada saat yang sama, ada seorang dari Amerika, bukan peneliti, tapi ikut istrinya yang ahli antropologi. Tiap hari ia main tenis dengan camat, dll. Dan kemudian membuat paper yang bagus sekali tentang sistem pemerintahan di kudus. Kenapa dia bisa lihat, padahal peneliti kita tadi bertahun-tahun tidak lihat. Jadi ini soal mata juga.

Pertanyaan Tocqueville waktu itu sederhana saja: apakah penjara ini dibuat sendiri-sendiri atau penghuninya ditempatkan bersama-sama. Jika sendiri-sendiri, maka akan ada guncangan psikologis bagi tahanan, jika bersama-sama maka penjara menjadi sekolah kejahatan. Itu yang diamati Tocqueville. Tapi menurut temannya, Demonk, Tocqueville sbenarnya mempunyai sesuatu yang lebih besar, dan hasilnya adalah "Demokrasi di Amerika." Orang Amerika sangat berterima kasih dengan adanya buku ini.

Sekarang giliran peserta untuk menanggapi presentasi celi tadi. Silahkan, Bung.

### **Penanya I:**

Nama saya Fajrul Rahman. Gua senang sekali bahwa buku ini ada di sini dan diterjemahkan oleh Freedom Institute. Menurut gua, sumbangan terbesar kalangan liberal di Indonesia adalah membongkar apa yang disebut feodalisme di Indonesia. Dan mudah-

mudahan juga oligarki. Nah, yang gua lihat dari pengantar celi ini adalah bahwa demokrasi Amerika, kata celi, bersifat liberal. Dan setahu gua, ada 2 posisi yang ingin mereka perjuangkan, yakni pemisahan kekuasaan dan persamaan, paling tidak persamaan di depan hukum. Nah, yang ingin gua tanyakan ke celi, tadi disinggung soal 1998. nah yang menjadi masalah adalah bahwa ada konglomerat kita yang memakan hampir 600 triliyun. Di antara mereka adalah yang dibawa ke istana. Dan salah satu yang lain adalah bosnya celi, Bung Abu Rizal Bakrie. Ia hutang 4, 3 triliyun. Nah pertanyaan gua, kalau ada persamaan di depan hukum, mengapa persamaan di depan hukum tidak dikenakan pada bosnya Rizal ini. Bagi kaum liberal persamaan di depan hukum kok kayaknya ada 'tetapi'-nya. Apakah ini anomali liberalisme di Indonesia.

## **Penanya II:**

Saya Rahman Tolleng. Tentang kehacuran pemerintah lokal. Dalam beberapa hal, kita sebenarnya sudah ada dalam keadaan tanpa negara, *stateless*. Bagi Ahmadiyah, penjual majalah yang sweeping FPI, dsb., tidak ada negara di sini. Jadi ini gejala nasional, dan bukan lokal. Tentu saja ini hitam putih. Ini kenapa? Apa yang belum dibahas oleh Celi tadi adalah bahwa di Amerika asosiasi-asosiasi itu berfungsi sebagai *mediating structure* antara masyarakat dan negara. Itu satu hal yang sangat penting, dan justru itu yang sekarang tidak ada di Indonesia. Memang ada partai politik, tapi partai politik kita tiba-tiba mengalami Amerikanisasi, dalam artian menjadi sangat longgar. Jadi tidak ada yang memperantarai warga dan negaranya. Ini juga dibahas oleh Tocqueville.

Sejak reformasi, di Indonesia ada pertarungan antara tiga jenis paham demokrasi. Ini tidak baru dan merupakan warisan dari masa lalu. Salah satunya adalah paham demokrasi yang sekarang kita anut, yakni demokrasi perwakilan. Sayangnya, ini menyimpang menjadi demokrasi orang yang mempunyai. Yang kedua adalah jenis demokrasi populisme. Atau katakanlah apa yang disebut *participatory democracy* yang ingin langsung rakyat terlibat. Dan yang ketiga, adalah apa yang disebut *executive rule*. Populisme adalah Soekarno, *executive rule* adalah Soeharto.

Yang ingin saya katakan adalah bahwa Tocqueville mengagumi demokrasi amerika karena dia melihat bahwa demokrasi amerika merupakan pemerintahan gabungan. Yakni gabungan antara raja, yakni presiden. Unsur kedua adalah aristokrasi. Bukan tradisional tapi baru. Dan ini dicerminkan oleh *electoral college*. Ini dicerminkan oleh Mahkamah Agung. Dan tentu saja ada populisme, egalitarianisme, yakni melalui pemilu. Itu yang ingin saya kemukakan. Sampai sekarang, pertarungan ini di Indonesia belum selesai. Saya tidak tahu sintesanya apa nanti. Saya berharap sintesanya adalah demokrasi perwakilan yang egaliter yang tidak terbatas pada mereka yang mempunyai. Dan salah satu obatnya adalah munculnya *mediating structure* yang sehat. Kalau ini tidak diperbaiki, maka saya khawatir kita menjurus pada anarkisme. Terima kasih.

## **Rizal Mallarangeng:**

Saya mau menjawab yang terakhir dulu. Memang setiap perubahan besar, seperti transisi demokrasi, itu selalu mendatangkan kecemasan dan harapan. Tapi seperti Tocqueville, kita tidak bisa hanya cemas terus atau hanya berharap. Jadi yang wajar dan perlu adalah

percampuran antara harapan dan kecemasan. Dan ini baik adanya. Cuma, jika kita cemas, kita cemas terhadap apa, dan kenapa? Jika kita berharap, kita berharap apa, dan kenapa? Dalam hal ini, apa yang dikatakan pak Rahman Tolleng saya setuju sebagian besar. Institusi sosial yang dibahas Tocqueville itu kan dalam bahasa modern adalah *intermediating institution*. Yakni *civil society*. Individu, negara dan di tengahnya ada lembaga-lembaga yang memediasi. Di kita itu ada pak Rahman, NU dan Muhammadiyah itu kan lembaga-lembaga masyarakat. Cuma ada bedanya. Di sana Protestantisme dan puritan, di sini Islam. Bedanya apa? Apakah ini menghasilkan corak demokrasi yang berbeda? Jadi saya sepenuhnya *on your side*, meski kita bisa berbeda dalam penekanan.

Ok, sekarang ke Fajrul. Dia kan bilang kita ini serdadu intelektual SBY. Asyik benar ini. Saya terima kasih kalau pernyataan Fajrul benar. Tapi kita harus periksa faktanya dulu. Ini kan kasus BLBI. Pada masa krisis, negara dihadapkan pada dua dilema: yang pertama, membiarkannya tanpa intervensi, yang membuat *the break down of the whole financial institution*. Yang kedua adalah pilihan *the lesser evil*. Oleh karena itu pemerintah gelontorin duit yang begitu banyak. Ada yang bilang 600 trilyun, ada yang bilang 500. Nah, mestinya setelah mereka dibantu, ada proses pengembalian bertahap dengan aturan-aturan tertentu. Waktu itu dilakukan, hanya ada beberapa orang yang berhasil membayar itu secara teratur. Orang pertama adalah Anthony Salim. Orang kedua yang beres adalah Aburizal Bakrie. Jadi mereka telah membayar 4,3 trilyun plus bunganya. Awal 2004 semua sudah beres, sebelum Bakrie ikut konvensi Golkar.

Jadi, jika anda mengatakan hal itu pada 2002, 2001, apa yang anda katakan benar. Karena waktu itu tak ada satu pun yang beres. Kedua orang tadi adalah orang pertama yang membereskan persoalannya dengan BLBI. Jadi ini bukan karena Freedom Institute dibantu oleh Aburizal Bakrie. Ini faktual saja. Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan, karena ini berkaitan dengan konsistensi. Jadi itulah jawaban dari serdadu intelektual SBY.

### **Hamid:**

Ok, Selanjutnya. Silahkan Neng.

### **Penanya III:**

Ok, nama saya Neng. Tadi Rizal sudah menyederhanakan Tocqueville. Jadi demokrasi di Amerika itu berkaitan dengan keadaan geografis, kedua agama protestan, dan ketiga keinginan untuk berasosiasi, serta keempat semangat otonomi diri. Kita tarik ke Indonesia. Di Indonesia ini kan berbeda. Pertama, agamanya Islam. Otonomi diri itu kecil. Justru yang terjadi adalah kolektivitas. Terus tidak memiliki sejarah bersimbah darah merebut kemerdekaan. Tidak seperti Amerika yang imigran. Ini artinya kulturnya berbeda.

Nah, saya ingin bertanya, apakah sesuatu yang di sana, dengan pengalaman yang panjang dan kultur yang berbeda, diterapkan di sini. Ini kenapa? Karena saya percaya demokrasi. Tapi bagaimana dengan kultur, *spirit*, dan yang macem-macem itu. Saya kira demokrasi bukan sesuatu yang sangat baik. Tapi dia yang relatif terbaik. Ini karena masih ada kritik, transparansi, dsb.

Jadi pertanyaan saya adalah bahwa kita ini mayoritas Islam, NU dan Muhammadiyah, nah bisa nggak kita mengadopsi pengalaman-pengalaman Amerika untuk di sini. Karena kalau saya baca Weber, demokrasi itu bagian dari agama Protestan. Di Islam, itu kan kita pertanyakan apakah demokrasi bagian dari agama. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih.

**Hamid:**

Silahkan penanya berikutnya.

**Penanya IV:**

Nama saya Marko. Tocqueville saya kira sangat memuji demokrasi di Amerika. Saya pernah tinggal di Amerika beberapa tahun. Berdasarkan pengalaman ini, saya ingin *share* bagaimana sebaiknya. Ini menurut saya. Tadi dikatakan bahwa demokrasi di Amerika adalah masalah otonomi dan kesetaraan di depan hukum. Hal ini saya kira benar karena memang budaya dan geografinya seperti itu. Juga agama Protestan yang sangat memicu munculnya paradigma seperti itu.

Saya juga pernah tinggal di Jepang. Nah, kenapa kita tidak belajar ke Jepang. Di sana juga ada *ewuh pakewuh*. Nah, kenapa kita harus belajar ke Amerika dan bukan ke Jepang. Yang jelas, kultur Jepang dan kita hampir sama. Jadi saya kira kita perlu belajar ke kultur yang dekat dengan kita, kultur oriental.

Yang kedua, demokrasi di Amerika bukanlah *the most success system in the world*. Ini kan juga perlu diuji lagi dengan adanya kebangkitan Cina, misalnya.

**Rizal Mallarangeng:**

Kita harus akui bahwa demokrasi Amerika, sebagai sebuah sistem, mempunyai berbagai kelemahan. Tapi inilah demokrasi modern pertama, dan juga yang paling stabil. Tidak pernah berubah karakternya. Dan inilah sistem yang paling menjamin *check and balances*. Bukan karena saya pernah sekolah di Amerika dan anak saya lahir di Amerika. Semua sistem pernah dicoba dan jatuh bangun dan akhirnya hancur. Sosialisme dan komunisme pernah dicoba di Soviet. Dan ini pernah berhasil beberapa periode. Tapi *cost*-nya terlalu besar. Jadi anda tinggal pilih, barang yang tahan lama atau barang yang mudah hancur.

Kalau soal belajar ke Jepang, ini bagus. Pertanyaannya itu bagus, kenapa kita tidak belajar ke Jepang dan hanya Amerika? Jawabannya singkat, lha *wong* orang Jepang aja belajar ke Amerika. Contohnya gampang. Anda pernah nonton film *the last samurai*? Di situ terlihat bahwa orang Jepang dengan berani mengirim orang untuk belajar ke Amerika. Ini terjadi pada masa Meiji. Dan mereka berhasil melakukan industrialisasi. Kuncinya hanya satu, membuka diri pada dunia luar. Dia tidak takut pada perubahan. Cina pernah besar. Tapi kemudian cina menutup diri ke dalam. Dia tidak mau belajar.

Dalam *the last samurai* anda melihat bahwa Jepang mengirim utusan ke Amerika untuk mencari pelatih menembak. Mereka belajar bagaimana menggunakan peralatan

modern. Kenapa Jepang bisa besar? Karena mereka mau belajar. Belajar pada siapa? Ya pada Amerika.

Jadi soal kultur, jika gak cocok, kan bisa kita lakukan berbagai perubahan dan penyesuaian. Kita gak bisa hanya menyerah. Wah gak cocok gimana. Sekarang gak cocok, mungkin hal itu benar. Tapi kita harus berusaha mengubahnya. Kita tidak bisa membiarkan Indonesia begini saja. Jepang juga begitu. Mereka pada zaman Meiji tidak mau menerima kenyataan bahwa Jepang tertinggal terus.

**Hamid:**

Yang tentang modal sosial, pertanyaan dari Neng tadi, anda mau jawab, Cel?

**Rizal Mallarangeng:**

OK, ini benar. Ada kultur lokal seperti Islam yang pada tingkat tertentu kontraproduktif dengan semangat kemandirian. Saya gak tau ini benar apa gak. Tapi anda harus mengeceknya.

**Hamid Basyaib:**

Silahkan penanya yang lain. 3 orang ya.

**Penanya V:**

Ok, saya ingin melanjutkan mbak Neng tadi. Masalahnya adalah bahwa kultur yang kita lihat sekarang itu adalah kultur yang sudah terkorup akibat otoritarianisme, kolonialisme dsb, sehingga sulit untuk mengharapkan daya dorong atau *spirit* dari kultur yang semacam itu. Tapi pencomotan begitu saja konsep-konsep dari luar justru bisa semakin memperkuat rasa inferior kita pada saat kita ingin melakukan perubahan sosial. Hal ini karena kita merasa asing dan tidak menjadi diri sendiri. Akhirnya seperti menyalahkan apa yang ada dalam diri kita.

Menarik apa yang dikemukakan oleh Rizal tadi tentang film *The Last Samurai*. Jepang kan belajar dari Amerika bukan dalam hal-hal yang bersifat *software*, bukan nilai dan pandangan hidup. Tapi lebih pada hal-hal yang bersifat teknis. Keunggulan Amerika kan sebenarnya lebih pada kecanggihan-kecanggihan teknis. Dan Jepang sendiri mampu mengolah nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri dan disesuaikan dengan tantangan baru. Misalnya adalah bagaimana membuat semangat samurai dibuat menjadi massif. Jadi apa yang dulu merupakan nilai-nilai elite bangsa Jepang, dimassalkan sehingga menjadi milik semua orang Jepang.

Nah, di Indonesia saya lihat ada kesalahkaprahan dalam proses belajar tadi. Jadi akhirnya ketumpuk-tumpuk. Sudah kulturinya terkorup, ditambah proses belajar yang salah, akhirnya hanya memperkuat rasa menyalahkan diri sendiri. Jadi akhirnya menjadi bukan diri sendiri.

**Penanya VI:**

Terima kasih. Nama saya Tafaul. Saya ingin bertanya sekaligus berkomentar mengenai *truth claim* yang ada. Mas Rizal tadi mengatakan bahwa semua milik semua. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang positif dan negatif dari Amerika harus kita lihat dengan obyektif dan bukan apologi.

Nah, bagaimana cara mengambil jalan tengah dalam hal-hal yang positif dan negatif tersebut. Begitu juga Jepang. Jepang itu punya etika tinggi, jarang kita dengar kerusuhan di sana. Di Amerika, yang dianggap bermoral, waktu terjadi Katrina, muncul kerusuhan. Nah, bagaimana belajar tentang hal ini.

Dan terakhir, saya ingin menanggapi komentar yang mengaitkan Muhammadiyah dengan Wahabi. Sebenarnya orang Muhammadiyah itu agak marah jika dikatakan Wahabi. Karena saya juga pernah aktif di Muhammadiyah. Nah, orang Muhammadiyah itu juga sering mengatakan bahwa NU itu lebih dekat ke Hindu Budha, karena masih percaya klenik dan sebagainya. Marilah kita tidak saling mengkritik dan sebagainya. Terima kasih.

**Hamid:**

Ok, penanya berikutnya. Singkat saja ya.

**Penanya VII:**

Terima kasih. Sekadar komentar ya. Satu hal saya setuju dengan bang Rizal bahwa kita mesti belajar. Tapi di sisi lain saya melihat adanya inferioritas dalam diri kita dalam hal kompatibilitas kultural kita. Saya kira dalam setiap masyarakat ada sisi positif dan sisi negatif.

Saya ingat tahun 1990-an ada buku yang menarik tentang budaya demokrasi di nusantara. Maksud saya demokrasi tidak harus kita letakkan sebagai parameter dalam masyarakat A sehingga dia kompatibel atau tidak seperti yang dilakukan oleh Huntington. Kita bisa belajar dari Putnam dalam bukunya *Making Democracy Works*. Sosial kapital itu bukan monopoli masyarakat tertentu. Itu saya komentar saya. Terima kasih.

**Hamid:**

Silahkan. Anda yang di ujung itu. Anda yang terakhir.

**Penanya VIII:**

Saya Reza dari Fisip UI. Tadi ada pembicaraan tentang Weber. Satu hal yang mesti diingat adalah bahwa Weber menghubungkan etika Protestan dengan semangat masyarakat. Ada satu konsep yang lekat dengan Weber, yakni rasionalitas. Ini ingin saya hubungkan dengan *the break down of local government*. Yang menarik, terutama di daerah saya, Cianjur, konsep otonomi daerah hanya berhenti sebatas berlakunya hukum Islam di gerbang-gerbang jalan saja. Selalu jadi pertanyaan, misalnya, otonomi daerah ini untuk siapa? Apa keuntungan masyarakat lokal dengan adanya otonomi daerah? Saya sebagai anak daerah merasa tidak ada perubahan apa pun.

**Hamid:**

Ok, bung. Satu lagi. Anda yang terakhir.

**Penanya IX:**

Terima kasih. Saya Misbah dari Lakpesdam NU. Saya ingin bertanya dan berkomentar tentang beberapa hal, khususnya tentang metode Tocqueville. Kalau dia hanya meneliti pada daerah-daerah terpencil, saya khawatir ini hanya klaim Tocqueville tentang Amerika. Karena kalau kita pakai standar penelitian LSI, misalnya, representasi dari penelitian Tocqueville itu kayak apa.

Yang kedua tentang proses membangun demokrasi itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, saya bertanya apakah Tocqueville melihat proses transisi demokrasi sampai pada demokrasi. Saya melihat bahwa pelaksanaan demokrasi di sini masih reaktif, khususnya dalam penetapan otonomi, misalnya. Kita tahu bahwa UU otonomi, 1999, itu ditetapkan pada 2001. Itu diubah lagi pada 2004 menjadi UU no. 32. Ada persoalan mendasar di situ, soal reaktivitas petinggi-petinggi di Indonesia dalam hal bentuk negara dan pemerintahan. Dan UU no. 32, dalam bacaan kita, itu lebih mengarah pada resentralisasi. Ini bisa dilihat, misalnya, di tingkat desa. Kebetulan saya juga aktif di desa-desa. Penetapan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), misalnya, sekarang tidak lagi dipilih oleh rakyatnya. Ini artinya ada proses menarik kewenangan kembali ke pusat. Kewenangan gubernur di era 1999 itu sangat tidak ada, sekarang diotak-atik lagi sehingga kewenangan itu kembali pada tingkat propinsi. Usulan Sutiyoso tentang konsep Megapolitan, misalnya, adalah contoh upaya resentralisasi itu.

**Rizal Mallarangeng:**

Saya akan menjawab secara bersama. Tapi akan saya pilah dulu. Yang pertama pertanyaan dari UI tadi. Ini menarik. Tema-tema seperti desentralisasi, otonomi adalah tema-tema Tocquevillian. Kalau kita lihat di Cianjur, misalnya, itu ada *the breakdown of local government*. Tapi di sisi lain, ada arus besar daerah, misalnya jilbab. Ini yang tidak terjadi di Amerika, jika kita bandingkan. Sebenarnya di Amerika ada apa yang disebut sekularisasi. Pemisahan agama dan negara. Ini dibahas secara panjang lebar. Nah, kalau kita lihat otonomi di sini, gerakan Islam yang seperti itu kuat. Maka yang terjadi adalah reintegrasi. Di tingkat lokal ada terjadi reintegrasi agama dan negara. Dengan demikian, pertanyaan tentang Islam dan demokrasi kan jadi menarik.

Yang menarik lagi adalah soal belajar ke luar tadi. Apakah kita bangga atau tidak. Jika diangkat ke tataran yang lebih tinggi, pasti kita bangga. Kita tidak minta menjadi anak siapa. *We are born as Indonesian*. Ini bukan pilihan. David Hume membahas hal ini dengan sangat bagus. Tentang konsepsi masyarakat. Ini yang membedakan dia dari John Locke. Saya tak mau merunutnya sampai ke kolonialisme. Itu urusan kakek saya. Urusan saya tidak ada kaitannya dengan kolonialisme. Kita bangga sebagai Indonesia. Tapi kan persoalannya bukan bangga atau gak bangga. Persoalannya adalah apa yang kita perlukan untuk membesarkan Indonesia. Mau belajar di mana pun itu soal tempat. Tapi semangatnya adalah untuk berkembang.

Indonesia sebagai sebuah konsep kebangsaan lahir pertengahan abad 20. Kakek saya lebih merasa sebagai orang Bugis ketimbang Indonesia. Ibu saya transisi. Bugis dan Indonesia-nya seimbang. Saya sudah tidak ada urusan dengan Bugis. Kita-kita ini Indonesia. Kita generasi ke-3 dan ke-4 dari Indonesia. Memang masih ada persoalan, tapi pada dasarnya Indonesia sebagai sebuah bangsa sudah ada. Kalau melihat sejarah, kita ini adalah percampuran kebudayaan. Kita terima Hindu, Cina, dan Islam. Ada kata yang bagus dalam antropologi untuk mewakili fenomena ini: sinkretisme kebudayaan. Ini tema-tema dasarnya pak Umar Kayam-lah. Tidak ada identitas yang asli se asli-aslinya tanpa pengaruh. Itu cuma ada dalam fiksi.

Tapi persoalannya adalah apakah kita mau maju atau tidak. Pertama kemajuan adalah menghindari hal-hal yang ekstrem bukok. Di Yahukimo, anak cacingan mati. Sekolah tidak ada guru. Itu kita kalau mau maju kan harus menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kebanggaan atau inferioritas. Tujuan utama kehidupan apa? Mencegah hal-hal buruk terjadi. Dalam bahasa filsafatnya, *survival*. Semua intuisi dasar berhubungan dengan kematian dan kehidupan. Jadi jangan larikan ini ke masalah apakah kalau kita belajar ke Amerika kita inferior. Soalnya bukan itu.

Salah satu ciri politik Indonesia pascareformasi adalah fragmentasi. Gejala yang dapat dengan jelas anda lihat di DPR adalah fragmentasi yang tidak pernah habis. Bukan hanya berdasarkan partai, tapi juga berdasarkan individu. Tidak terjadi konsentrasi gagasan, tapi dekonsentrasi terus-menerus. Ini mungkin keunikan Indonesia. Sampai kapan akan terjadi penggumpalan kepentingan, gagasan. Bahkan kata Pak Rahman Tolleng tidak ada ideologi. Yang ada cuma pribadi, pertemanan dan loyalitas lama. Sekarang kita sudah lebih terbuka. Dan dengan demikian kita bisa membuktikan bahwa kita membangun dengan sama baiknya seperti pada masa Pak Harto. Kalau kita bisa lakukan hal itu dalam 10 atau 20 tahun, maka kita bisa berkata seperti Ronald Reagan ketika menutup masa jabatannya: *Not Bad At All*.

### **Hamid:**

Demikianlah acara kita. Saya tidak perlu menyimpulkannya. Sampai jumpa tiga minggu lagi. Tanggal 8 Maret kita akan ngomong tentang Amerika dan Dunia. Selamat malam. Terima kasih. Wassalam.